

LAPORAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA UTAMA PERIODE TRIWULAN I



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
DKI JAKARTA
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2024**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di wilayah, BPSIP DKI Jakarta menjalankan tiga program kegiatan, yaitu program nilai tambah dan daya saing industri; program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas; serta program dukungan manajemen. Yang menjadi target sasaran program BPSIP DKI Jakarta adalah: 1) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian, dengan indikator sasaran jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dan jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian; 2) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar, dengan indikator sasaran jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan; 3) Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator sasaran nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BPSIP DKI Jakarta; serta 4) Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator sasaran nilai kinerja anggaran BPSIP DKI Jakarta.

Berdasarkan evaluasi tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan, kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSIP DKI Jakarta pada triwulan I tahun anggaran 2024 sedang dalam proses memenuhi target tahunan sesuai yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2024.

Permasalahan yang menjadi kendala utama dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi di DKI Jakarta yaitu DKI Jakarta bukan merupakan daerah produsen karena keterbatasan lahan. Selain itu, pada tahun 2024 Jakarta kemungkinan bukan lagi ibukota negara, dan ini membawa potensi perpindahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20%. Meskipun demikian, tantangan Jakarta adalah mempertahankan posisinya sebagai kota global. Fokus utama adalah pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian untuk memenuhi standar tinggi yang dibutuhkan dalam skala global. Penerapan Standar di DKI Jakarta diterapkan untuk produk segar dan olahan (UMKM). Adapun kendala pelaku pertanian di Jakarta adalah a) sarana dan prasarana (keterbatasan lahan, kekurangan gudang, dan sarana pasca panen yang masih manual), b) sumber daya manusia (keterbatasan informasi tentang SNI, kurangnya kesadaran, dan administrasi yang lemah), c). produk (masih skala kecil, kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) baku, serta kendala biaya sertifikasi).

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka beberapa hal dapat dilakukan antara lain:

- 1) Jangka Pendek: Sosialisasi penerapan standar di komunitas pertanian, pemetaan mutu komoditas melalui optimalisasi pendampingan dan pelatihan penerapan standar;
- 2) Jangka Menengah: Penyusunan SOP penerapan standar komoditas, fasilitasi promosi dan pemasaran bagi yang menerapkan standar;
- 3) Jangka Panjang: Penerapan SNI pada produk segar dan olahan, memberikan apresiasi kepada pelaku usaha yang menerapkan standar, memberikan insentif kepada pelaku yang menerapkan standar

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi Balai	1
II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	5
2.1. Visi Kementerian Pertanian 2020-2024.....	5
2.2. Misi Kementerian Pertanian 2020-2024	6
2.3. Tujuan.....	6
2.4. Kegiatan	6
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	7
III. Akuntabilitas Kinerja.....	9
3.1. Capaian Kinerja	9
3.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024	9
3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja TA 2024	12
3.1.3. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	15
3.1.4. Capaian Kinerja Lainnya.....	16
3.2. Akuntabilitas Keuangan	16
3.2.1. Realisasi Keuangan	17
3.2.2. Pengelolaan PNBK	17
3.2.3. Hibah Langsung Luar Negeri	17
IV. Penutup	18
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja.....	18
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja.....	18

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Keadaan pegawai BPSIP DKI Jakarta berdasarkan jabatan dan jenjang pendidikan Triwulan I tahun 2024	4
Tabel 2. Keadaan pegawai BPSIP DKI Jakarta berdasarkan jenjang golongan dan jabatan Triwulan I tahun 2024	4
Tabel 3. Target capaian kinerja BPSIP DKI Jakarta Tahun 2024	7
Tabel 4. Program dan anggaran BPSIP DKI Jakarta TA 2024.....	8
Tabel 5. Capaian kinerja Triwulan I 2024 BPSIP DKI Jakarta	9
Tabel 6. Daftar SNI yang dimiliki BPSIP DKI Jakarta	13

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sesuai peraturan penerapan akuntabilitas yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, BSIP Kementan diwajibkan untuk:

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
2. Menyampaikan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun kepada Menteri Pertanian melalui Sekretariat Jenderal Kementan.

Atas dasar hal-hal di atas, BSIP Kementan sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2024 yang mencakup target seluruh Satker lingkup BSIP Kementan, salah satunya adalah Satker BPSIP DKI Jakarta. Dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam Capaian target kinerja utama Triwulan I BPSIP DKI Jakarta tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas mandat yang diemban. Dasar hukum penyusunan laporan capaian target kinerja Triwulan I BPSIP DKI Jakarta tahun 2024, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian meliputi:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi Balai

Melalui Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP)

telah resmi lahir sebagai salah satu unit kerja baru di lingkungan Kementerian Pertanian menggantikan Badan Litbang Pertanian. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) DKI Jakarta merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di DKI Jakarta dengan mandat mendukung penerapan dan diseminasi standar pertanian daerah/wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai tugas pokok "*melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi*". Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BPSIP Jakarta memiliki fungsi dalam hal:

- a. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, laporan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- c. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- d. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- e. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- f. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSIP DKI Jakarta berkoordinasi dengan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Secara struktural, BPSIP DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan didukung oleh Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Analis Standardisasi dan Penyuluh.

Struktur Organisasi BPSIP DKI Jakarta



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP DKI Jakarta TA 2024

Sumber kekuatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta diantaranya dalam hal dukungan sumberdaya manusia, baik kuantitasnya, maupun kualitas dan kinerjanya. Jumlah pegawai BPSIP DKI Jakarta pada Triwulan I 2024 sebanyak 31 orang PNS dan 1 tenaga PPPK pustakawan. Selain itu, BPSIP DKI Jakarta dibantu pula oleh 13 orang tenaga kontrak yang terdiri dari 3 pengemudi, 4 satpam, 2 petugas kebersihan, serta 4 tenaga pramubakti. Keragaan pegawai BPSIP DKI Jakarta pada Triwulan I 2024 disajikan pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Keadaan pegawai BPSIP DKI Jakarta berdasarkan jabatan dan jenjang pendidikan Triwulan I tahun 2024

Bidang Tugas	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	S3	S2	S1	SM	≤ SLTA	
Pejabat Struktural	1		1			2
Pejabat Fungsional:						
• Analis Standardisasi	1	8	1			10
• Penyuluh Pertanian		2	2			4
• Calon Peneliti		1				1
• Pustakawan			1			1
Analis Kepegawaian				1		1
Petugas Belajar			1			1
Administrasi			2	2	7	11
Jumlah	2	11	8	3	7	31

Tabel 2. Keadaan pegawai BPSIP DKI Jakarta berdasarkan jenjang golongan dan jabatan Triwulan I tahun 2024

Bidang Tugas	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Pejabat Struktural			1	1	2
Pejabat Fungsional:					
• Analis Standardisasi			10		10
• Penyuluh Pertanian			3	1	4
• Calon Peneliti			1		1
• Pustakawan			1		1
Analis Kepegawaian		1			1
Petugas Belajar			1		1
Administrasi		5	6		11
Jumlah		6	23	2	31

Selain dukungan sumber daya manusia, dalam menjalankan Tupoksinya, BPSIP DKI Jakarta didukung oleh sumber dana utama yang berasal dari dana APBN yang tertera dalam DIPA BPSIP DKI Jakarta TA 2024 dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.400.339.000,- yang digunakan untuk membiayai program utama Balai yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp 285.610.000, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp 130.332.000, serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 4.984.397.000.

II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Terkait pembentukan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sebagai salah satu unit kerja Kementerian Pertanian, tugas pokok dan fungsi seluruh UK/UPT BSIP mengacu pada Tusi BSIP yaitu menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian, seperti tertuang dalam Perpres No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/Rc.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Renstra BSIP DKI Jakarta 2023-2024 memuat perencanaan lima tahunan untuk mendukung arah dan sasaran strategis pembangunan pertanian.

Dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 Kementan, maka kebijakan BSIP diarahkan untuk mendukung program strategis Kementerian Pertanian, Strategi Operasional, serta Strategi Pendukung. Melalui Perpres 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, BSIP dibentuk untuk melaksanakan tugas standardisasi instrumen pertanian.

2.1. Visi Kementerian Pertanian 2020-2024

Mengacu pada visi Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan Kabinet Kerja yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", maka visi Kementerian Pertanian adalah:

"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Makna dari visi tersebut yaitu majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

2.2. Misi Kementerian Pertanian 2020-2024

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Makna yang dapat diambil dari misi tersebut dijabarkan sebagai berikut. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

2.3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020 - 2024 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
3. Terwujudnya Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

2.4. Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPSIP DKI Jakarta tahun 2020 – 2024 melaksanakan dua program teknis yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan satu Program Dukungan Manajemen. Sasaran kinerja dengan target output tahunan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2023, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sedang menjalani proses transisi kelembagaan sebagai dampak dari penarikan tupoksi penelitian dan pengembangan yang ada di kementerian/lembaga ke Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Di luar kegiatan dukungan manajemen, BPSIP Jakarta juga melaksanakan

kegiatan teknis sesuai Tusi baru, diantaranya yaitu kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan; Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi; Perbenihan Padi di DKI Jakarta.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, BPSIP DKI Jakarta telah menetapkan target kinerja yang harus dicapai yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala BPSIP DKI Jakarta dengan Kepala BSIP, dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 5.400.339.000. Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat empat sasaran yang ingin dicapai disertai indikator kinerjanya. Sampai dengan Triwulan I tahun 2024, telah dilakukan dua kali perubahan PK, salah satunya terkait adanya revisi anggaran. Target kinerja BPSIP DKI Jakarta berdasarkan Target DIPA yang terakhir disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3. Target capaian kinerja BPSIP DKI Jakarta Triwulan I Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	7
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta (Nilai)	80

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta (Nilai)	86

Tabel 4. Program dan anggaran BPSIP DKI Jakarta TA 2024

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	282.000.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp.	282.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	175.332.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp.	175.332.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	4.988.007.000
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp.	4.988.007.000

III. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja

Pada tahun anggaran 2024, BPSIP DKI Jakarta telah menetapkan empat sasaran strategis untuk dicapai. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan lima indikator kinerja output. Persentase pencapaian target kinerja sampai dengan Triwulan I berdasarkan sasaran strategis tahun 2024 dikategorikan ke dalam berkinerja baik.

3.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024

Berdasarkan PK TA 2024, capaian kinerja BPSIP DKI Jakarta sampai dengan Triwulan I disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Capaian kinerja Triwulan I 2024 BPSIP DKI Jakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	7	0
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta (Nilai)	80	86,44

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta (Nilai)	86	0

Sasaran 1: Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Indikator Kinerja 1: Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)

Beberapa metode yang digunakan dalam pelaksanaan diseminasi standar instrumen pertanian antara lain melalui pameran, *display*, Percontohan penerapan standar instrumen pertanian, lokakarya dan event/pertemuan lainnya; Peningkatan kapasitas penerima diseminasi melalui Forum Pertemuan seperti: bimbingan teknis, pelatihan, dan kegiatan pertemuan lainnya; Optimalisasi media cetak, elektronik dan media sosial sangat terkait dengan kegiatan diseminasi lainnya, seperti penyusunan materi penyuluhan, displai, percontohan penerapan, dan forum pertemuan.

Indikator Kinerja 2: Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Pertanian sampai saat ini masih hadir di perkotaan Jakarta. Lahan sawah masih ada untuk membantu penyediaan beras sebagai komoditas utama nasional. Jakarta juga memiliki komoditas unggulan yaitu alpukat Cipedak. Selain itu, usaha-usaha mikro dan kecil (UMK) pengolahan produk hasil pertanian banyak dilakukan di berbagai pelosok wilayah Jakarta. Keberadaan aktivitas dan usaha pertanian tersebut cukup berkontribusi dalam mendukung pengembangan pertanian perkotaan dan terciptanya kemandirian pangan di Jakarta.

Namun demikian, untuk lebih meningkatkan daya saing produk pertanian Jakarta dan menjadikan keberadaannya lebih dikenal dan lebih diterima oleh masyarakat, maka produk-produk tersebut haruslah berkualitas baik dan memenuhi standar yang berlaku. Oleh karena itu, berbagai usaha dan kegiatan untuk lebih mengenalkan program-program pendampingan penerapan standar instrumen pertanian sangat diperlukan sebagai upaya agar lembaga/pelaku/praktisi pertanian di Jakarta menjadi lebih "melek" standar. Dengan alasan tersebut, untuk meningkatkan penerapan standar

bidang pertanian oleh lembaga/petani/kelompok tani/pelaku UMK bidang pertanian di DKI Jakarta maka kegiatan pendampingan dan pengujian penerapan standar instrumen pertanian ini dilaksanakan.

Sasaran 2: Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Indikator Kinerja: Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)

DKI Jakarta masih memiliki lahan sawah potensial sekitar 400 ha yang masih memproduksi sampai sekarang. Kebutuhan benih padi VUB per musim di Jakarta kurang lebih 9-10 ton untuk seluruh lahan sawah yang ada di Jakarta. Keterbatasan sumber benih menjadi salah satu alasan VUB padi belum banyak dibudidayakan oleh petani. Kegiatan perbenihan padi di DKI Jakarta perlu dilakukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan benih padi tersebut. BPSIP DKI Jakarta bekerja sama dengan instansi terkait berusaha menyediakan benih padi. Tersedianya benih VUB padi yang tersertifikasi di Jakarta akan mendukung terjaganya ketahanan pangan, mempercepat penyebaran benih VUB padi bersertifikat, dapat membantu petani untuk bisa membudidayakannya, dan pada akhirnya akan memudahkan masyarakat mendapatkan beras berkualitas di wilayah Jakarta. Varietas padi yang akan digunakan dalam kegiatan perbenihan padi ini adalah Inpari 30.

Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Indikator Kinerja: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta (Nilai)

Tahap-tahap pembangunan Zona Integritas (ZI) terdiri dari Pencanangan ZI dimana kegiatan tersebut dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan pembangunan Zona Integritas diukur dengan menilai pelaksanaan dari parameter-parameter komponen pengungkit dan

komponen hasil. Komponen Pengungkit diberi bobot 60% dan Komponen Hasil diberi bobot 40%.

Sasaran 4: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Indikator Kinerja: Nilai kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta (Nilai)

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Nilai Kinerja Anggaran ini berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART yang dibuat DJA Kemenkeu. Sehingga pihak yang melakukan pengukuran IKSK ini adalah Kemenkeu berdasarkan input rencana penarikan, capaian output dan kendala pencapaian output Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta pada aplikasi SMART.

3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja TA 2024

A. Indikator Kinerja 1: Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)

Indikator kinerja ini diukur melalui capaian jumlah paket standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan pengguna, baik melalui kegiatan strategis maupun kegiatan kerjasama/kemitraan. Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan, maka capaian kegiatan ini termasuk berhasil dengan tingkat capaian 100%. Namun demikian, nilai tersebut tidak menggambarkan tingkat penerapan standar maupun tingkat kecepatan penerapan standar oleh pengguna.

Pada tahun anggaran 2024 tidak tersedia anggaran diseminasi standar instrumen pertanian pada DIPA BPSIP Jakarta, untuk pencapaian target PK diseminasi dilakukan melalui penyebaran benih pertanian terstandar dan materi diseminasi kepada masyarakat, penyebaran informasi terkait standar instrumen pertanian pada layanan permohonan narasumber yang diselenggarakan stakeholder terkait, serta secara daring yang salah satunya melalui media sosial. Benih terstandar yang didiseminasikan di tahun 2024 adalah benih padi label ungu tersertifikasi hasil kegiatan perbenihan padi di tahun 2023. Sedangkan materi

diseminasi yang diseberluaskan adalah Buletin Standar Instrumen Pertanian, yang memuat informasi seputar kegiatan standardisasi instrumen pertanian di DKI Jakarta. Untuk mendiseminasikan SNI maupun standar instrumen pertanian lainnya pada Triwulan I tahun 2024 telah dilakukan diseminasi standar instrumen pertanian melalui media sosial daftar instrumen pertanian yang telah didiseminasikan melalui media sosial dijelaskan pada Tabel 6.

Tabel 6. Daftar SNI yang dimiliki BPSIP DKI Jakarta

No	Jenis Standar	Nomor Standar	Keterangan SNI
1	SNI Wajib Kementan	SNI 8267:2016 SNI 3140-1:2020 SNI 3140-3:2020 SNI 6729-2016 SNI 7763:2018 SNI 482:2018 SNI 13-7168-2006	Kitosan cair sebagai pupuk organik Gula Kristal mentah Gula Kristal-Putih Sistem Pertanian organik Pupuk organik padat Kapur untuk pertanian Syarat mutu zeolite sebagai bahan pembenah tanah pertanian
2	Mengenal PSAT		Pangan Segar Asal Tumbuhan

B. Indikator Kinerja 2: Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Capaian indikator kinerja ini diukur melalui jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian. Target pendampingan penerapan standar tahun 2024 dalam rangka mendukung program utama kementerian pertanian adalah penerapan SNI, akan tetapi karena kegiatan masih di blokir kegiatan baru sampai tahapan pembuatan rencana kegiatan. Meskipun demikian Sampai dengan Triwulan I Pada tahun 2024, Pendampingan SNI Bina UMK telah menghasilkan 1 UMKM yang memperoleh sertifikat SNI Bina UMK, yaitu Felisha Bakery dengan produk roti, Jakarta Timur. Mereka sudah berhak dan sudah menampilkan logo SNI Bina UMK di kemasan produk yang dihasilkan.

C. Indikator Kinerja 3: Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)

Capaian indikator kinerja ini diukur melalui capaian produksi benih padi terstandar. Kegiatan perbenihan merupakan salah satu kegiatan strategis

Kementan, salah satunya untuk menekan laju inflasi yang diakibatkan oleh komoditas pertanian strategis, diantaranya adalah komoditas padi. Target produksi benih padi di DKI Jakarta sebanyak 5 ton. Capaian kegiatan karena adanya blokir anggaran.

D. Indikator Kinerja 4: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta (Nilai)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pada Triwulan I tahun 2024 telah dilakukan penilaian zona integritas secara mandiri lingkup BSIP. Target kinerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BPSIP DKI Jakarta tahun 2024 sebesar 80. Hasil penilaian mandiri Pembangunan Zona Integritas BPSIP DKI Jakarta pada Triwulan I sebesar 84.44. Hasil penilaian masih diukur secara mandiri, tidak melalui evaluator dan sebagian masih menggunakan dokumen 2023. Hasil penilaian diukur dari beberapa ketersediaan dan kelengkapan dokumen zona integritas BPSIP DKI Jakarta.

E. Indikator Kinerja 5: Nilai kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta DKI (Nilai)

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Nilai Kinerja Anggaran ini berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART yang dibuat DJA Kemenkeu. Sehingga Pihak yang melakukan pengukuran IKS ini adalah Kemenkeu berdasarkan input rencana penarikan, capaian output dan kendala pencapaian output Balai Penerapan Standar Instrumen

Pertanian DKI Jakarta pada aplikasi SMART. Sampai dengan Triwulan I Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Jakarta Tahun 2024 belum muncul. Saat ini Aplikasi SMART DJA belum melakukan perhitungan Nilai Kinerja Anggaran, masih dalam proses refreshment dan maintenance aplikasi.

3.1.3. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Secara umum, target kinerja BPSIP DKI Jakarta tahun anggaran 2024 dapat tercapai dengan berhasil, baik atas dukungan faktor internal maupun eksternal. Secara eksternal, keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh adanya koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait, adanya peningkatan respon atas segala umpan balik yang diperoleh, peningkatan kualitas berbagai pelayanan terhadap publik baik layanan kerjasama maupun layanan pengkajian lainnya, serta peningkatan pengelolaan database dan website, sehingga terjalin berbagai kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan, baik dengan institusi pemerintah, masyarakat petani maupun akademisi wilayah DKI Jakarta. Sedangkan faktor internal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja BPSIP DKI Jakarta tahun 2024 antara lain dukungan kerja tim BPSIP DKI Jakarta yang mumpuni, dukungan sarana prasarana serta anggaran yang memadai, dan peningkatan manajemen perencanaan dan monitoring evaluasi secara periodik sehingga fungsi kontrol kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Karena keterbatasan sumberdaya manusia di Subbagian Tata Usaha maka beberapa Pegawai dari Tim Kerja dan Kelompok Fungsional dilibatkan sebagai Operator Pelaporan pada Modul Akuntansi dan Pelaporan dan Pemegang Uang Muka Kerja. Hal ini kadang mengakibatkan proses pembukuan dan penatausahaan keuangan, barang milik negara dan persediaan tidak berjalan optimal, namun demikian belum sampai ke tahap terlambat.

Permasalahan yang menjadi kendala utama dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi di DKI Jakarta yaitu DKI Jakarta bukan merupakan daerah produsen karena keterbatasan lahan. Selain itu, mulai tahun 2024 Jakarta kemungkinan bukan lagi ibukota negara, dan ini membawa potensi perpindahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20%. Meskipun demikian, tantangan Jakarta adalah mempertahankan posisinya sebagai kota global. Fokus utama adalah pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian untuk memenuhi standar tinggi yang dibutuhkan dalam skala global. Penerapan Standar di DKI Jakarta diterapkan untuk produk segar dan olahan (UMKM). Adapun kendala pelaku pertanian di Jakarta adalah a) sarana dan prasarana (keterbatasan lahan, kekurangan gudang,

dan sarana pasca panen yang masih manual), b) sumber daya manusia (keterbatasan informasi tentang SNI, kurangnya kesadaran, dan administrasi yang lemah), c). produk (masih skala kecil, kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) baku, serta kendala biaya sertifikasi).

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka beberapa hal dapat dilakukan antara lain:

- 1) Jangka Pendek: Sosialisasi penerapan standar di komunitas pertanian, pemetaan mutu komoditas melalui optimalisasi pendampingan dan pelatihan penerapan standar;
- 2) Jangka Menengah: Penyusunan SOP penerapan standar komoditas, fasilitasi promosi dan pemasaran bagi yang menerapkan standar;
- 3) Jangka Panjang: Penerapan SNI pada produk segar dan olahan, memberikan apresiasi kepada pelaku usaha yang menerapkan standar, memberikan insentif kepada pelaku yang menerapkan standar

Strategi yang dilaksanakan BPSIP Jakarta DKI dalam akselerasi diseminasi standar instrumen pertanian kepada target sasaran adalah melalui peningkatan kuantitas dan atau kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi standar instrumen pertanian termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai roda penggerak penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) meningkatkan profesionalismenya dan sikap pengabdian pada bangsa dan negara terutama terkait dengan penerapan standar instrumen pertanian sehingga dapat meningkatkan kualitas produk, baik produk segar maupun produk olahan. Peningkatan kompetensi bagi PNS dilakukan antara lain melalui pelatihan jangka pendek seperti short course, pelatihan teknis, seminar maupun workshop.

3.1.4. Capaian Kinerja Lainnya

Sebagai UPT BSIP, BPSIP DKI Jakarta tetap berupaya untuk berkontribusi terhadap pengembangan pertanian yang maju, mandiri dan modern, salah satunya melalui kerjasama dengan stakeholder terkait. Sampai dengan Triwulan I tahun 2024 BPSIP Jakarta telah bekerjasama dengan beberapa universitas negeri baik yang berlokasi di Jakarta dan di luar Jakarta terkait magang merdeka belajar mahasiswa.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Dalam menjalankan Tupoksinya, pada tahun 2024 BPSIP DKI Jakarta didukung oleh sumber dana utama yang berasal dari dana APBN, yang tertera dalam DIPA BPSIP DKI Jakarta nomor SP DIPA-018.

09.2.633961/2024 dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.400.339.000,-. Anggaran dimaksud digunakan untuk membiayai program utama Balai yang dilaksanakan yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, serta Program Dukungan Manajemen.

3.2.1. Realisasi Keuangan

Sampai dengan Triwulan I tahun 2024 terdapat revisi anggaran sebanyak 2 kali revisi. Realisasi Keuangan per 31 Maret 2024 sebesar Rp. 954.658.196 (20,44%)/ Tingginya serapan anggaran merupakan salah satu indikator dari adanya perencanaan yang baik, di dukung oleh adanya monitoring pelaksanaan dan penggunaan anggaran yang cukup sehingga realisasi fisik maupun keuangan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan.

3.2.2. Pengelolaan PNBPN

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Maret 2024 sebesar Rp. 0. Hal ini disebabkan karena anggaran masih di blokir.

3.2.3. Hibah Langsung Luar Negeri

Pada tahun anggaran 2024, BPSIP DKI Jakarta tidak memperoleh hibah luar negeri langsung, baik dalam bentuk barang maupun uang.

IV. Penutup

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Kepala BPSIP DKI Jakarta menetapkan target kinerja tahunan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala BPSIP Jakarta kepada Kepala BSIP. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut, Kepala BPSIP Jakarta menetapkan empat sasaran yang harus tercapai yaitu 1) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian, 2) meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar, 3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, serta 4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Jumlah total pagu anggaran tahun 2024 yang diperoleh untuk melaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, serta Program Dukungan Manajemen yaitu sebesar Rp. 5.400.339.000,-..

Indikator kinerja dari sasaran pertama antara lain: 1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dengan capaian 1 SNI; dan 2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dengan capaian 1 Lembaga. Indikator kinerja dari sasaran kedua yaitu Jumlah produksi standar instrumen terstandar yang dihasilkan dengan capaian 0 Unit dari nilai yang ditargetkan sebesar 5 Unit. Indikator kinerja dari sasaran ketiga adalah Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta dengan capaian nilai 86.44, akan tetapi ini masih dalam tahapan penilaian mandiri.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2024, maka capaian fisik kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSIP Jakarta pada Triwulan I tahun anggaran 2024 telah cukup sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Hingga saat ini, BPSIP DKI Jakarta telah menjalani tugas fungsinya untuk *melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi*. Dalam pelaksanaan kegiatan, terkadang ditemui kendala yang bersifat teknis di lapangan, namun kendala-kendala tersebut dapat diatasi sehingga tidak sampai mengakibatkan kegagalan. Dalam upaya meningkatkan daya guna hasil kegiatan, BPSIP DKI Jakarta juga terus meningkatkan jalinan kerjasama

dengan berbagai pihak, dalam rangka akselerasi penerapan dan penyebaran *standar instrumen pertanian spesifik lokasi*.

Permasalahan yang menjadi kendala utama dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi di DKI Jakarta yaitu DKI Jakarta bukan merupakan daerah produsen karena keterbatasan lahan. Selain itu, mulai tahun 2024 Jakarta kemungkinan bukan lagi ibukota negara, dan ini membawa potensi perpindahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20%. Meskipun demikian, tantangan Jakarta adalah mempertahankan posisinya sebagai kota global. Fokus utama adalah pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian untuk memenuhi standar tinggi yang dibutuhkan dalam skala global. Penerapan Standar di DKI Jakarta diterapkan untuk produk segar dan olahan (UMKM). Adapun kendala pelaku pertanian di Jakarta adalah a) sarana dan prasarana (keterbatasan lahan, kekurangan gudang, dan sarana pasca panen yang masih manual), b) sumber daya manusia (keterbatasan informasi tentang SNI, kurangnya kesadaran, dan administrasi yang lemah), c). produk (masih skala kecil, kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) baku, serta kendala biaya sertifikasi).

Seiring dengan perkembangan persaingan pasar global, BPSIP DKI Jakarta sebagai unit fungsional BSIP di daerah, akan terus melaksanakan kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan para stakeholder, untuk meningkatkan mutu produk dan daya saingnya di pasar global.